

SKRIPSI
KEBIJAKAN PERTANIAN KABUPATEN PINRANG
(STUDI TENTANG KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN
PINRANG)



DISUSUN OLEH:

MUH. YUSRIL ALIAH

E041171508

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU POLITIK
2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

***KEBIJAKAN PERTANIAN KABUPATEN PINRANG (STUDI TENTANG
KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN PINRANG)***

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH.YUSRIL ALIAH

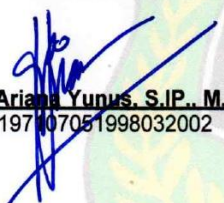
E041171508

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

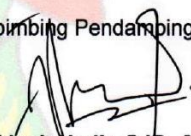
Pada tanggal : 5 Desember 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

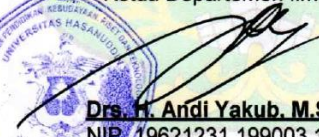

Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP.197107051998032002

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791216 2008122002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik


Dr. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PERTANIAN KABUPATEN PINRANG
(STUDI TENTANG KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH. YUSRIL ALIAH

E041171508

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Muhammad Saad, MA. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP.,M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Yusril Aliah
NIM : E041171508
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

Kebijakan Pertanian Kabupaten Pinrang (Studi Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,
Yang Menyatakan



(Muh. Yusril Aliah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim...

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kebijakan Pertanian Kabupaten Pinrang (Studi Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang)** salam dan salawat tentunya penulis curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi surih tauladan bagi umat islam.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Tidak hanya itu penulis berharap dengan skripsi ini dapat mendatangkan kebermanfaatan dan menambah pengetahuan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis selalu berusaha mempersembahkan karya terbaik dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis dalam penyusunan skripsi, tidak dapat dipungkiri berbagai hambatan dan tantangan yang ditemukan, akan tetapi dengan semangat dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Drs.Nasruddin Said Aliah dan Ibu Hj.Rina Nasir yang telah merawat,

membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini. Sungguh tidak dapat penulis bandingkan betapa besarnya pengorbanan yang telah engkau berikan kepada anakmu. Penulis berdoa dan berjanji agar membahagiakan mereka berdua, meskipun penulis mengetahui tidak mampu membalas cinta mereka. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga inti dan keluarga besar atas motivasi yang selalu diberikan dalam proses penyelesaian pendidikan Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Tidak luput juga penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si. selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si. selaku Wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si. selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si. selaku pembimbing kedua, penulis banyak-banyak mengucapkan terima kasih selama proses bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, semoga bernilai ibadah dan diberikan kesehatan dalam setiap aktivitas.
8. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana

A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

9. Seluruh Pegawai dan Staf Departemen Ilmu Politik yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru SMAN 1 Pinrang yang saya banggakan dan cintai atas segala jasa dalam mendidik sehingga penulis sampai ke tahap ini. Sesungguhnya penulis belum mampu membalas segala jasa Bapak dan Ibu guru, tapi penulis selalu mendoakan dan berjanji akan membalas segala kebaikan-kebaikan tersebut.
11. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada organisasi daerah Kerukunan Mahasiswa Pinrang KMP UNHAS, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menjadi rumah yang menyenangkan dan selalu dirindukan.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan program Studi Ilmu Politik 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian hebat dan luar biasa, semoga kelak kita bertemu dengan peran masing-masing yang kita cita-citakan.

14. Kepada sahabat-sahabat saya yang sudah seperti saudara yakni Yusril Imam Wahyudi, Andi Aidil Fitra.p, Best Lasinrang, RB Bopeng, dan BTP Squad. Terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang diberikan. Susah senang kita bersama dalam meraih kesuksesan. Semoga kelak kita dipertemukan dengan peran strategis dalam membangun Indonesia maju.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perspektif Politik Pertanian.....	9
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	11
2.3 Peran Pemerintah Sebagai Aktor Kebijakan Publik.....	13
2.4 Telaah Pustaka.....	16
2.5 Kerangka Berfikir.....	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Dasar, Tipe dan Jenis Penelitian.....	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Informan Penelitian.....	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	30
4.1 Kondisi Geografis, Administrasi Dan Kondisi Topografi.....	30
4.2 Kebijakan Pertanian Kabupaten Pinrang.....	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
5.1 Faktor Yang Menyebabkan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Masyarakat.....	41
5.2 Peran Dan Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pinrang.....	51
5.2.1 Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi.....	52
5.2.2 Peran Partisipatif Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi.....	59

BAB VI PENUTUP.....	66
6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	73

ABSTRAK

Muh. Yusril Aliah. NIM E041171508. Kebijakan Pertanian Kabupaten Pinrang (Studi Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang). Pembimbing Ariana Yunus dan Sakinah Nadir.

Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam sektor pertanian. Salah satu tujuan dari kebijakan pertanian adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan konsep kebijakan publik dalam hal ini peran aktor dalam kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang disebabkan karena alokasi pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Pinrang tidak memenuhi atau tidak mencukupi dengan alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi pemerintah daerah berperan aktif dengan membentuk tim pengawasan kebijakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, membentuk kebijakan mengenai aturan pendistribusian pupuk dan penetapan harga eceran tertinggi, serta membentuk petugas penyuluh lapangan agar mensosialisasikan ke petani. Pemerintah Daerah melakukan peran partisipatif pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani serta memberikan bantuan pupuk kepada petani.

Kata kunci : *kebijakan pertanian, peran pemerintah, kabupaten pinrang.*

ABSTRACT

Muh. Yusril Aliah. NIM E041171508. Agricultural Policy of Pinrang Regency (Study of Scarcity of Subsidized Fertilizers of Pinrang Regency). Advisor Ariana Yunus and Sakinah Nadir

Agricultural policy is an action implemented by the government in the agricultural sector. One of the objectives of agricultural policy is to increase the productivity of agricultural products and improve people's welfare in the agricultural sector. This study aims to describe the causes of the scarcity of subsidized fertilizers in Pinrang District and the local government's efforts to overcome the scarcity of subsidized fertilizers.

To answer the problems in this research, the concept of public policy is used, in this case the role of actors in policy. This study uses qualitative methods with data collection techniques direct interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this study data reduction, data presentation, drawing conclusions.

The results of this study indicate that the cause of the scarcity of subsidized fertilizers in Pinrang Regency is due to the allocation of subsidized fertilizers needed by farmers in Pinrang Regency which does not meet or are not sufficient with the allocation of subsidized fertilizers provided by the central government, in this case the Ministry of Agriculture. In an effort to overcome the scarcity of subsidized fertilizers, the regional government played an active role by forming a policy oversight team for the mechanism for distribution of subsidized fertilizers, forming policies regarding fertilizer distribution rules and setting the highest retail price, and forming field extension officers to disseminate information to farmers. The Regional Government performs a participatory role in assisting the community regarding empowering farmer groups and providing fertilizer assistance to farmers.

Keywords: agricultural policy, the role of government, pinrang district.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*). Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional.

Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Hal itu dikarenakan, hasil pertanian dan perkebunan dikenal sangat melimpah di negara ini hingga bisa diekspor ke beberapa negara. Hal tersebut dapat meningkatkan ekspor dan pendapatan ekonomi negara Indonesia. Menjadi penopang hidup masyarakat Indonesia khususnya para petani. Terdapat 34 provinsi yang berperan penting dalam peningkatan pertanian di Indonesia salah satunya provinsi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang cukup potensial merupakan penghasil tanaman pangan terbesar di kawasan timur Indonesia. Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Perkembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan di daerah Sulawesi Selatan salah satunya diprioritaskan pada komoditas padi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman pangan padi merupakan tanaman sumber makanan utama bagi penduduk Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Sulawesi Selatan meliputi 21 kabupaten dan 3 kota.

Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu daerah yakni Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Pertanian di Kabupaten Pinrang sangatlah baik terutama pada pertanian padi yang menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah penyumbang padi terbesar

di Sulawesi Selatan. Dimana terdiri dari 12 kecamatan dengan komoditas potensi unggulan di antaranya padi . Hal ini di dukung oleh irigasi yang berasal dari daerah aliran sungai terbesar di Sulawesi Selatan yakni Sungai Saddang dimana ada Bendung Benteng yang mengairi hampir sebagian besar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pinrang.

Dalam melakukan kegiatan usaha tani tentunya diperlukan pemberian pupuk. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Program pemberian pupuk bersubsidi menjadi program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, tersedia dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sektor pertanian tahun anggaran 2021¹ kemudian di perkuat dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor: 521/071/01/2021/DTPHBUN tanggal 6 januari 2021 tentang alokasi dan

¹ Peraturan Pemerintah Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian Tahun Anggaran 2021

harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021.²

Dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mempunyai kartu tani, bergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem (e-RDCK), alokasi pupuk bersubsidi diberikan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota, dan pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai (HET). Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dengan luasan paling luas 2 hektare setiap musim tanam.

Namun saat ini, fakta yang ada dilapangan ditemukan permasalahan yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi. Para petani di Kabupaten Pinrang mengeluh pupuk subsidi yang biasa digunakan mengalami kelangkaan. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk luas lahan pertanian di Kabupaten Pinrang tidak sebanding dengan alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pupuk merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi pertanian, sehingga kelangkaan pupuk dapat berdampak buruk bagi pertanian masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Pinrang saat ini. Berikut gambar tabel kebutuhan pupuk bersubsidi untuk luas lahan pertanian di Kabupaten

² Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tanggal 6 Januari 2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

Pinrang serta gambar tabel penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang tahun 2021:

Tabel. 1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang Tahun 2021.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PETANI	LUAS	PUPUK (Kg)				
				UREA	ZA	SP.36	NPK	ORGANIK
1	SUPPA	2.263	6.726,94	1.138.065	670.234	152.550	1.655.204	3.314.349
2	MATTIRO BULU	6.347	16.839,96	2.595.829	1.710.332	20.682	4.630.324	8.730.330
3	LANRISANG	4.145	9.840,41	1.522.233	956.022	64.640	2.911.616	4.885.660
4	MATTIRO SOMPE	5.025	12.935,86	2.002.932	1.289.956	62.786	3.881.058	6.467.930
5	WATANG SAWITTO	4.652	10.588,50	1.597.808	770.040	1.400	3.071.152	4.967.218
6	TIROANG	5.887	12.057,54	1.845.356	794.707	68.600	3.366.977	589.995
7	PALETEANG	3.247	5.856,82	877.664	560.436	8.489	1.680.214	1.279.539
8	CEMPA	5.479	15.434,05	2.430.208	944.528	6.900	4.161.353	7.480.030
9	PATAMPANUA	7.344	16.469,88	2.474.671	836.587	53.890	4.907.817	8.035.020
10	DUAMPANUA	10.679	24.281,26	3.847.276	2.078.251	278.124	4.455.670	11.372.981
11	BATU LAPPA	3.404	9.416,80	1.087.721	724.920	0	3.322.305	3.624.600
12	LEMBANG	7.787	20.719,41	2.689.302	1.630.843	1.390	6.580.836	8.160.606
TOTAL		64.208	161.167,42	24.109.065	12.966.856	719.451	44.624.526	68.908.358

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dalam angka, 2021

Tabel. 2 Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK BERSUBSIDI (DALAM TON)						
		UREA	ZA	SP-36	NPK	NPK KHUSUS	ORGANIK GRANUL	ORGANIK CAIR
1	Paleteang	841,50	105,54	6,90	443,00	4,00	46,00	114,00
2	Lanriang	1.463,07	178,88	64,64	771,00	-	141,00	351,00
3	Tiroang	1.753,09	146,16	69,30	887,00	-	25,00	63,00
4	Duampanu	3.699,00	387,68	274,00	1.570,00	23,00	315,00	769,00
5	Mattiro Bulu	2.524,40	379,87	20,58	1.266,00	-	139,00	347,00
6	Batu Lappa	1.009,20	131,34	-	445,00	61,00	104,00	260,00
7	Walang Sempito	1.512,70	140,15	-	800,00	-	143,00	358,00
8	Sappa	1.126,72	130,74	148,00	458,00	-	103,00	258,00
9	Cempa	2.342,50	175,41	6,90	1.102,00	4,00	212,00	529,00
10	Lembang	2.373,04	279,87	1,39	1.654,00	77,00	211,00	528,00
11	Patampanu	2.374,10	157,33	62,80	1.300,00	31,00	277,00	566,00
12	Mattiro Sompe	1.963,78	247,03	62,49	1.046,00	-	187,00	468,00
	JUMLAH	22.984,00	2.410,00	707,00	11.742,00	200,00	1.853,00	4.633,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dalam angka, 2021

Gabungan 5 kelompok tani Dusun Kampung Baru, Desa Waetuo Kecamatan Lanriang menggelar gerakan pengendalian (gerdal) yang turut di hadiri Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam kesempatan itu Bupati Pinrang menyempatkan diri berdialog dengan para petani yang umumnya mengeluhkan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi. Dan di Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe gabungan kelompok tani juga melaksanakan kegiatan (gerdal) dalam kesempatan itu Bupati Pinrang turut berkesempatan hadir. Bupati Pinrang menyempatkan diri berdialog dengan para petani yang umumnya juga mengeluhkan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi.³

³ Tim SindoNews, "Bupati Pinrang Harap Petani Bersatu Untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian", (<https://makassar.sindonews.com/read/718927/713/bupati-pinrang-harap-petani-bersatu-untuk-tingkatkan-produktivitas-pertanian-1647831786/10>, diakses pada 13 April, 23.38)

Merespon keluhan petani, puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pinrang. Massa mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) mempertanyakan kelangkaan pupuk subsidi.⁴

Berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang berdampak pada mahalanya harga pupuk di pasaran, sudah seharusnya peran pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam peningkatan hasil produksi pertanian terwujud.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui secara jelas peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Dengan demikian penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul penelitian: “kebijakan pertanian Kabupaten Pinrang studi tentang kelangkaan pupuk bersubsidi Kabupaten Pinrang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi ?

⁴ Nining Agraeni, “aliansi-perjuangan-rakyat-pinrang-demo-kenaikan-het-pupuk-bersubsidi”, (<https://makassar.tribunnews.com/2021/01/08/aliansi-perjuangan-rakyat-pinrang-demo-kenaikan-het-pupuk-bersubsidi>, diakses pada 13 April, 23.38)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk menjelaskan penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi dan peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam upaya mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat atau kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pengetahuan kepada pembaca agar dapat memahami kebijakan pertanian dan peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi kelangkaan pupuk subsidi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang dalam kebijakan pertanian Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perspektif Politik Pertanian

Perspektif politik pertanian merupakan salah satu bagian dalam kajian ilmu politik. Politik menurut Miriam Budiardjo adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Pada sebuah kelompok masyarakat dalam menghadapi terbatasnya sumber daya, dicari suatu cara distribusi supaya seluruh masyarakat merasa bahagia dan puas. Cara inilah yang disebut politik. Lebih lanjut, Miriam Budiardjo, dalam buku yang sama menjelaskan bahwa pada umumnya politik adalah usaha untuk menentukan peraturan – peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, supaya dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁵ Politik sendiri menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.⁶

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam

⁵ Prof Meriam Budiardjo, “*Dasar – Dasar Ilmu Politik*”,(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008),hlm.13-15.

⁶ Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta:PT Gramedia

pertanian biasa dipahami orang sebagai budi daya tanaman atau bercocok tanam (*cultivation*) pembesaran hewan ternak (*raising*).

Politik pertanian menurut Monke dan Pearson adalah campur tangan pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat menghasilkan output nasional yang maksimal dan meratakan pendapatan, yaitu mengalokasikan keuntungan pertanian antargolongan dan antardaerah, keamanan persediaan jangka panjang.

Politik pertanian merupakan sikap dan tindakan sektor publik dalam kehidupan pertanian untuk mencapai sasaran tertentu. Sektor publik yang dimaksud adalah pemerintah dalam kehidupan pertanian, meskipun sektor publik tidak selamanya pemerintah. Hal ini lebih dekat dengan istilah kebijakan pertanian sebagai terjemahan dari *Agricultural Policy* sehingga politik pertanian disebut juga dengan kebijakan pertanian.⁷

Kebijakan pertanian diatur oleh institusi pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat petani dan secara umum di wilayah tersebut. Petani sebagai sekelompok masyarakat juga memiliki kepentingan untuk memajukan usahatani demi peningkatan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dapat diturunkan melalui program-program atau kebijakan dalam mendukung sektor pertanian.

⁷ Widodo, Sri. 2021. Politik Pertanian. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Konsep kebijakan pertanian yakni serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga tujuan umum dari kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan meningkat.⁸ Lebih lanjut dijelaskan, terdapat enam ruang lingkup kebijakan pertanian yaitu sebagai berikut:

1. kebijakan produksi
2. kebijakan subsidi
3. kebijakan investasi
4. kebijakan harga
5. kebijakan pemasaran
6. kebijakan konsumsi.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Defenisi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich ia memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

⁸ Wulandari, Andi Tika. 2015. Kerjasama Luar Negeri Kabupaten Bantaeng dengan Jepang di Bidang Pertanian. Skripsi. FISIP. Universitas Hasanuddin

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu kelompok tertentu. Sedangkan menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.⁹

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Menurut Miriam Budiarjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka disimpulkan kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas untuk memecahkan suatu masalah baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga. Dalam

⁹ Prof. Dr. Budi Winarno, MA, Kebijakan Publik Teori Dan Proses,(Yogyakarta : Media pressindo, 2007),hlm.17-18

¹⁰ Prof Miriam Budiarjo," Dasar Dasar Ilmu Politik",(Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008),hlm.20.

penelitian ini kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan sektor pertanian.

2.3 Peran Pemerintah Sebagai Aktor Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai aktor formal (resmi) dalam proses kebijakan memiliki peranan yang signifikan karena pemerintah memiliki kedudukan dan wewenang yang tertinggi dalam membuat kebijakan di suatu negara. Kebijakan ini juga yang nantinya harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, dan tanggung jawab). Dimana didalamnya terdapat

serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan

kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹¹

Oleh sebab itu, penulis bermaksud melihat peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yakni bupati, wakil bupati atau dinas pertanian, dan perangkat kerja lainnya yang berupaya mewujudkan perencanaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis peran aktif dan peran partisipatif pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal ini sejalan dengan jenis-jenis peran yang telah dijabarkan dalam penjabaran di atas.

2.4 Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada tiga literatur yaitu dua skripsi dan satu jurnal. Telah pustaka ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca terkait ide, persamaan dan perbandingan terhadap penelitian. Berikut ini telaah pustaka yang peneliti lakukan.

Pada literatur pertama yaitu skripsi yang berjudul 'politik pertanian (studi tentang implementasi subsidi pupuk di kabupaten Ponorogo)'. Dalam skripsi ini membahas terkait politik pertanian dalam bidang kebijakan subsidi pupuk yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Seringkali dalam implementasi kebijakan terjadi permasalahan yaitu adanya kelangkaan pupuk bersubsidi padahal

¹¹ Soekanto, Teori Peran. (Jakarta:Bumi Aksara.2002)

pemerintah telah memproduksi melebihi kuota yang telah ditetapkan. Sehingga perlu diketahui bagaimana tata niaga pupuk bersubsidi, kepentingan apa yang mempengaruhi kondisi tersebut. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini bahwa terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi untuk kepentingan tertentu dan lemahnya pengawasan bahkan pemerintah sulit menghadapi. Sehingga diperlukan kerja sama antar lembaga terkait agar permasalahan dapat diselesaikan.

Selanjutnya, persamaan dari literatur skripsi dengan penelitian ini adalah membahas kebijakan pertanian sebagai bagian dari kajian ilmu politik. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang berusaha memberikan penjelasan secara factual terhadap fenomena yang berlaku.

Kemudian hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan literatur skripsi adalah fokus penelitian. Di mana dalam literatur skripsi menjelaskan politik pertanian dalam bidang kebijakan pupuk subsidi Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan kebijakan pertanian Kabupaten Pinrang studi tentang kelangkaan pupuk bersubsidi Kabupaten Pinrang.

Pada literatur kedua yaitu skripsi yang berjudul 'peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jenepono'. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa daerah di Kecamatan Rumbia memiliki potensi pertanian yang dapat mendukung

perekonomian masyarakat jika di optimalkan dengan baik. Sebab berbagai permasalahan berlaku diantaranya pemerintah daerah masih kurang memberikan perhatian dukungan sarana dan prasarana dan tidak optimalnya penyuluhan kepada masyarakat petani. Sehingga peran pemerintah sangat penting dalam mendukung potensi tersebut. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan pemerintah daerah belum mengoptimalkan dalam menjalankan perannya.

Selanjutnya, persamaan dari literatur skripsi dengan penelitian ini adalah kajian kebijakan pertanian dalam merealisasikan tugasnya di sektor pertanian. Selain itu, tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode kualitatif.

Kemudian perbedaan literatur skripsi dan penelitian ini yaitu literatur kedua hanya menjelaskan pokok permasalahan mengenai Sumber Daya Alam (SDA) pertanian di bidang hortikultura seperti tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias dan obat yang memiliki potensi perekonomian. Dengan pokok bahasan yaitu bagaimana peran pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan pokok permasalahan tentang kebijakan pertanian di bidang kebijakan pemerintah daerah.

Pada literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul 'peran politik pertanian dalam pembangunan pertanian menghadapi era revolusi industri 4.0 di sektor pertanian'. Dalam jurnal ini membahas terkait peran politik

pertanian dari masa ke masa hingga masa kini dalam era industri 4.0 perkembangan tersebut terjadi berbagai macam persoalan pertanian. Peran politik pertanian dalam kajian ini menjelaskan perlu segera melakukan penstabilan harga pangan murah dan memperbesar ekspor. Bagi petani harus dijamin akses air bersih, lahan dan permodalannya. Pertanian dalam menghadapi industri 4.0 menuntut pengembangan teknologi pertanian agar kedepannya memberikan dampak dan tantangan.

Selanjutnya, persamaan dari literatur jurnal dengan penelitian ini adalah kajian kebijakan pertanian. Selain itu, tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode kualitatif.

Kemudian, perbedaan literatur jurnal dan penelitian ini yaitu literatur ketiga mengambil fokus pada perkembangan politik pertanian dari masa ke masa dalam menghadapi industri 4.0 menggambarkan secara terpusat kondisi politik pertanian tersebut dan tantangan yang akan dihadapi di sektor pertanian. Sedangkan dalam penelitian ini menggambarkan terkait peran pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi Tampak jelas penelitian ini mengkaji kebijakan pertanian.

2.5 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang

penting. Kebijakan pertanian di buat untuk mensejahterahkan petani mengingat keadaan pertanian tidak stabil salah satunya kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Pinrang petani di Kabupaten Pinrang mengeluh pupuk subsidi yang biasa digunakan masih langka. Dalam hal itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga pengedaran pupuk di lapangan berjalan dengan baik .

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir

